

KEBIJAKAN FISKAL MENURUT FUNGSI DI REGIONAL SULAWESI DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh:
Nudiatulhuda Mangun

ABSTRAK

Studi kebijakan fiskal dilakukan pada 81 Kabupaten, 12 Kota dan 7 Provinsi yang ada di regional Provinsi Sulawesi serta Nusa Tenggara Timur. Belanja pegawai terendah adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 27 persen dan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi yang memperhatikan Alokasi pengeluaran untuk pembangunan ekonomi ranking pertama ditempati Provinsi Sulawesi Selatan dan yang terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk alokasi parasarana Umum Sulawesi Selatan menempati ranking pertama dan yang terakhir adalah Provinsi Gorontalo. Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan pertama dan terakhir Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal, Regional, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur,

I. PENDAHULUAN

Tingkat harga, nilai tukar mata uang, inflasi, pertumbuhan suku bunga, ketidakseimbangan neraca pembayaran luar negeri, dan pertumbuhan penduduk, adalah parameter makro ekonomi selalu menjadi materi dasar diajarkan pada mahasiswa ekonomi saat awal kuliah dimulakan. Parameter makro ekonomi tersebut selalu menjadi persoalan bagi setiap negara, dan persoalan ini tidak mengenal batas wilayah atau negara, kejadiannya pun secara bersamaan, bahkan kejadiannya di negara lain ikut mempengaruhi kondisi yang sama di negara lain. Misalkan dalam mengimpor barang hal yang mengikut adalah perubahan harga di negara asal kemudian di susul dengan nilai tukar mata uang negara yang sedang bertransaksi. Kejadian tersebut lebih sering di kenal dengan impor inflasi. Peristiwa tadi merupakan konsekuensi sebuah negara yang menganut sistem perekonomian terbuka.

Pertanyaannya adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah kejadian masa kini yang disebutkan di atas, juga terjadi di masa lalu atau di masa Klasik?. Sebelum sampai kepada pertanyaan tersebut perlu menengok masa lalu secara ringkas kejadian pada tahun 1930-an yang di kenal dengan resesi perekonomian.

Pada saat itu perekonomian yang dipelopori oleh Kaum Klasik dengan mekanisme pasarnya tidak berdaya mengatasi krisis ekonomi, Dalam mekanisme pasar privatisasi sangat dominan, karena tidak mengenal pelaku lain selain peran individu dalam perekonomian. Kaum Klasik juga mempunyai tuntunan yang dijadikan *tracking*, seperti *laissez faire-laissez fases* bahwa setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Masih dengan anggapannya kaum Klasik bahwa penawaran itu selalu menciptakan permintaan (*supply creates its own demand*). Menganut faham ini pengangguran diyakini tidak akan terjadi. Kemudian peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian dibatasi pada bidang-bidang yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta. Seperti pertahanan, hukum, dan pengelolaan Negara. Kini pemerintah telah menjadi pelaku dalam perekonomian, dan pertanyaannya adalah apakah setiap negara di mana pun di dunia ini telah bebas dari persoalan parameter makro ekonomi yang disebutkan di atas?, menjadi hal yang menarik untuk di kaji.

Tulisan ini hadir tujuannya untuk mempelajari peran pemerintah mengendalikan perekonomian negara terutama dalam menghadapi persoalan makro ekonomi. Salah satu instrumen pemerintah saat ini dalam mengatasi persoalan makro ekonomi adalah Kebijakan stabilisasi. Kebijakan ini tujuannya

1) Staf Pengajar pada Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu.

untuk mengendalikan roda perekonomian negara.

Pemerintah ikut mengatur perekonomian negara, karena mengikuti anjuran dari Kaum Keynesian, dan peran tersebut telah berlangsung sejak 1930-an tujuannya adalah untuk mengatasi resesi ekonomi pada saat itu. Anjuran ini merupakan bentuk koreksi Keynesian terhadap mekanisme pasar. Mekanisme pasar pada saat itu lebih mengutamakan peran individu atau swasta yang dianggap tidak mampu lagi mengatasi resesi. Dengan kehadiran pemerintah menjadi pelaku ekonomi, pertanyaannya adalah apakah persoalan makro ekonomi telah berakhir? Kenyataannya tidak demikian.

Belajar dari resesi perekonomian tahun 1930-an tersebut kedua mashab Klasik dan Keynes ini mengakui bahwa kapital memegang peran penting dalam mengendalikan perekonomian. Dan sejak saat itu pula pelaku ekonomi bertambah dari individu dan swasta ketambahan pemerintah sebagai pelaku ekonomi lainnya.

Kenyataannya waktu telah berubah dari masa 1930-an dan telah masuk pada era teknologi, seperti persoalan makro ekonomi yang dihadapi masa kini masih sama dengan masa lalu, masih tetap berulang peristiwa-peristiwa tingkat harga, nilai tukar mata uang, inflasi, pertumbuhan suku bunga, ketidak seimbangan neraca pembayaran luar negeri, dan pertumbuhan penduduk,

Jika kembali pada anjuran Keynesian agar pemerintah ikut menata perekonomian, dan pada bagian lain perekonomian juga sedang menghadapi persoalan makro ekonomi, maka kondisinya yang dapat disoroti di pilah menjadi dua bagian "*perekonomian negara saat ini sedang menghadapi persoalan makro ekonomi*", dan "*kehadiran pemerintah diharapkan mampu menghadapi krisis*".

Kemudian bagaimana dengan Indonesia, sedang menghadapi persoalan makro ekonomi inflasi, pengangguran, pertumbuhan penduduk, ketidak seimbangan neraca pembayaran luar negeri. Apakah peran pemerintah sudah efektif mengatur perekonomian saat ini?!!

Pertanyaan operasionalnya adalah seperti apa dan apa saja peran pemerintah yang sedang menghadapi persoalan makro ekonomi

tersebut. Secara teoritis ada beberapa cara yang dapat diperankan oleh pemerintah dalam menghadapi persoalan makro ekonomi. Kajian kali ini melihat peran pemerintah pada kebijakan stabilitas khususnya dalam menjalankan instrumen kebijakan fiskal.

II. BAHAN DAN METODE

Sasaran yang diinginkan dicapai dalam tulisan ini difokuskan pada beberapa daerah otonom, yang ada di regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Masing-masing daerah otonom di pilih karena memiliki kemiripan alokasi fungsi *budgeting*, dalam mengatur perekonomiannya.

1.1. Karakteristik Daerah

Secara kewilayahan masing-masing daerah memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Masing-masing wilayah juga mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berbeda pula. Tetapi dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah pun hampir mirip, dan yang berbeda adalah pada kebutuhan sehingga alokasinya menurut skala prioritas masing-masing daerah.

1.2. Wilayah Studi pada Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan area studi, maka sasaran studinya pada kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Di Sulawesi memiliki 6 Provinsi yang terdiri dari Provinsi: Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Gorontalo, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Masing-masing provinsi ini memiliki daerah Kabupaten dan Kota.

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 21 Kabupaten (Jeneponto, Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Wajo, Luwu Timur, dan Toraja Utara), dan 3 Kota (Makassar, Pare-Pare, dan Palopo).

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 10 Kabupaten (Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Toli-Toli, Donggala, Morowali, Poso, Parigi Moutong, Tojo Una Una, dan Sigi) dan 1 Kota (Palu).

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 11 Kabupaten (Kepulauan Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Sangihe Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Bolaang Mongondow Selatan) dan 4 Kota (Bitung, Manado, Tomohon, Kotamobagu).

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 10 Kabupaten (Wakatobi, Muna, Konawe Selatan, Buton, Konawe, Kolaka, Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara) dan 2 Kota (Kendari, Bau-Bau).

Provinsi Gorontalo mempunyai 5 Kabupaten (Boalemo, Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara) dan 1 Kota (Gorontalo).

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 5 Kabupaten (Manjene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Utara).

Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 19 Kabupaten (Flores Timur, Lembata, Ngada, Rote Ndao, Alor, Belu, Ende, Kupang, Manggarai, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Manggarai Barat) dan 1 Kota (Kupang).

Secara ringkas jumlah fokus studi adalah pada 7 Provinsi, 81 Kabupaten dan 12 Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Daerah Fokus Studi Provinsi, Kabupaten dan Kota

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah
1	Sulawesi Selatan (Sulsel)	21	3	24
2	Sulawesi Tengah (Sulteng)	10	1	11
3	Sulawesi Utara (Sulut)	11	4	15
4	Sulawesi Tenggara (Sultra)	10	2	12
5	Sulawesi Barat (Sulbar)	5	-	5
6	Gorontalo (Grtl)	5	1	6
7	Nusa Tenggara Timur (NTT)	19	1	20
Total		81	12	93

Sumber: APBD Provinsi, Kabupaten, Kota Seluruh Indonesia 2010.

1.3. Kebijakan Fiskal

Metode yang digunakan dalam menganalisis kebijakan fiskal berlandaskan pada beberapa pendekatan deskriptif. Secara teoritis kebijakan stabilitas ada beberapa instrumen, menurut Putong (2008) ada 4 yang dapat diperankan oleh pemerintah;

1. Kebijakan fiskal (dipelopori oleh kaum Keynesian)
2. Kebijakan moneter (dipelopori oleh Milton Friedman)
3. Kebijakan upah dan pendapatan
4. Kebijakan industri dan perdagangan.

Masih dari sumber yang sama bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan kebijakan pengelolaan yang dikelompokkan dari sisi permintaan (*demand side management policies*), dan 2 kebijakan lainnya adalah kebijakan pengelolaan yang dikelompokkan dari sisi penawaran (*supply side management policies*).

Definisi kebijakan fiskal menurut Putong (2008) adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara secara nasional di kenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedang di daerah di kenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maksud kehadiran APBN/D adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Sebagaimana juga layaknya suatu rumah tangga individu, pemerintah sebagai sebuah rumah tangga nasional (daerah) juga memerlukan pendapatan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari, seperti menggaji pegawai negeri, mengatur dan mengurus negara (daerah) dan pemerintahan. Adapun yang dijadikan pendapatan oleh pemerintah adalah pajak yang di pungut dari masyarakatnya, dapat pula berupa pinjaman luar negeri (daerah), pendapatan dari perusahaan negara, dan masih banyak lainnya.

Kebijakan fiskal secara teoritis juga ada 2, yaitu kebijakan fiskal deskresioner dan kebijakan fiskal penstabil otomatis. Kedua kebijakan ini saling bersinergi dalam pelaksanaannya. Tetapi di dalam kebijakan fiskal deskresioner itu sendiri ada 2 hal yang dilakukan pemerintah yaitu, pertama kebijakan belanja surplus atau lebih di kenal dengan kebijakan ekspansif. Dan yang kedua adalah

kebalikan dari yang pertama kebijakan belanja defisit. Kalau kebijakan belanja surplus atau kebijakan ekspansif dilakukan manakala kondisi perekonomian sedang mengalami tingkat: pengangguran tinggi, inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Sebaliknya kebijakan kontraktif atau kebijakan belanja defisit dilakukan pemerintah manakala kondisi perekonomian sedang mengalami tingkat pengangguran rendah, suku bunga rendah, dan tingkat harga terlambat berubah. Sesungguhnya banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dilontarkan dalam hal ini. Seperti berapa persen pengangguran yang dapat ditolerir dalam sebuah perekonomian?, demikian pula halnya dengan inflasi, suku bunga, sehingga mengharuskan kepada pemerintah segera melaksanakan kebijakan ekspansif atau kebijakan anggaran belanja surplus tersebut. Sebaliknya pula seberapa rendah tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan lambatnya perubahan harga, yang mengharuskan pemerintah untuk bertindak dengan kebijakan anggaran defisit atau kebijakan kontraktif.

Sampai tulisan ini dihadirkan ukuran-ukuran yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk melaksanakan kebijakan ekspansif maupun kebijakan kontraktif belum ketemu. Sehingga penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, tetapi hanya sampai pada mendiskusikannya.

Fungsi-fungsi utama kebijakan fiskal, seperti yang disebutkan oleh Soediyono (1992), terkait dengan fungsi: alokasi, distribusi, dan stabilitas. Itu pun kali ini kajiannya hanya sampai pada aspek alokasi anggaran negara saja.

Berdasarkan tujuan kebijakan fiskal dan penerapannya, ada beberapa hal yang menarik dan perlu diperhatikan. Menurut Putong (2008) dari sisi tujuan kebijakan fiskal itu untuk:

- a. Mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja.
- b. Untuk stabilitas harga.
- c. Untuk mengatur laju investasi.
- d. Untuk mendorong investasi sosial secara optimal.
- e. Untuk menanggulangi inflasi.
- f. Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional.

- g. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Kebijakan dari sisi penerapannya menurut Suparmoko (1991) terdiri dari:

- a. Untuk pembiayaan fungsional.
- b. Untuk pengelolaan anggaran.
- c. Untuk Stabilisasi anggaran otomatis.
- d. Anggaran belanja seimbang (paradigma ini telah mengalami banyak perubahan).

1.4. Analisis Penerapan

Kebijakan fiskal setiap tahun dapat di evaluasi melalui penerapannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Terutama pada komposisi pendapatan/penerimaan dan pengeluaran negara/daerah. Perlu juga di ketahui bahwa menyusun APBN/D ini berlandaskan pada prinsip-prinsip anggaran berimbang, dinamis dan fungsional.

Daerah otonom yang dijadikan fokus studi adalah pada tingkat Kabupaten dan Kota. Berdasarkan ketersediaan data publikasi, menggunakan data APBD masing-masing daerah. Misalkan data APBD Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten yang ada di Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.

Ada pun data APBD yang dipergunakan dalam analisis ini adalah berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Dalam Negeri. Sedang sebagian data APBD daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah menggunakan data APBD 2011.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data alokasi APBD 2010 secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yakni: (1) alokasi menurut Fungsi, (2) alokasi menurut Jenis Belanja, dan (3) alokasi menurut Urusan.

Selanjutnya berdasarkan data APBD tahun 2010 pula bahwa Pendapatan terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Adapun rincian pendapatan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut;

Tabel 2
Struktur Pendapatan pada APBD 2010

No	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
1	Pajak Daerah	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	Hibah
2	Retribusi Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Darurat
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana bagi hasil pajak dari Prov. dan Pemerintah daerah lainnya
4	Lain-Lain PAD yang sah		Dana Penyesuaian & otonomi khusus
5			Bantuan Keuangan dari Prov. atau pemerintah daerah lainnya
6			Lain-lain pendapatan yang sah

Demikian pula dengan struktur belanja yang ada dalam APBD 2011 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Berikut uraiannya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Struktur Belanja pada APBD 2010

No	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai
2	Belanja Bunga	Belanja Barang dan Jasa
3	Belanja Subsidi	Belanja Modal
4	Belanja Hibah	
5	Belanja Bantuan Sosial	
6	Belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes	
7	Belanja bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Pemdes	
8	Belanja tidak terduga	

1.1. Analisis Menurut Fungsional APBD 2011

Berdasarkan data APBD 2010 pada 7 Provinsi daerah studi, prioritas kajian menurut fungsi dan jenis pengeluaran yang telah di rangking. Alokasi fungsional APBD untuk pelayanan umum (PU), pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum (PFU), perlindungan sosial (PS), lingkungan hidup (LH), pariwisata dan budaya (PB), ketertiban dan ketentraman (KK). Sedangkan

penetapan rangking besarnya 1 sampai 7 berdasarkan jumlah daerah studi. Dari Sembilan alokasi fungsional budgeting APBD tersebut masing-masing provinsi berbeda-beda dalam menetapkan skala prioritas.

Diperhatikan total belanja dari ketujuh provinsi ini, Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati rangking pertama, di susul provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Gorontalo (Grtl).

Untuk sektor pembangunan PU, Sulsel rangking pertama, kedua Sultra, ketiga Sulut, keempat Sulteng, Kelima NTT, keenam Sulbar, dan Gorontalo yang ketujuh.

Alokasi fungsional budgeting untuk sektor pembangunan pendidikan Sultra menempati rangking pertama, di susul Sulsel ditempat kedua, rangking ketiga Sulteng, keempat Sulut, kelima Sulbar, NTT keenam dan yang rangking ketujuh Gorontalo.

Provinsi Sulsel menempati rangking pertama mengalokasikan anggaran untuk sektor pembangunan kesehatan, di susul NTT ditempat kedua, ketiga Sulteng, selanjutnya Sultra, Sulut, Sulbar, Gorontalo masing-masing rangking keempat sampai dengan ketujuh.

Di sektor pembangunan ekonomi masih ditempati oleh provinsi Sulsel di rangking pertama. Di susul NTT, Sultra, Sulut, Sulteng, Gorontalo, dan Sulbar.

Sektor pembangunan yang mendapat perhatian dari pemerintah adalah PFU sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Provinsi Sultra menempati rangking pertama untuk sektor tersebut. Sulsel diurutan kedua, ketiga Sulteng, keempat Sulut, kelima NTT, keenam Sulbar, dan Gorontalo yang ketujuh.

Secara berturut-turut Provinsi NTT menempati rangking pertama dalam alokasi APBD-nya untuk sektor pembangunan PS. Sulsel kedua, Sulut ketiga, keempat Sulteng, kelima Sultra, Gorontalo keenam dan yang menempati rangking ketujuh adalah Provinsi Sulbar.

Sektor LH Sulsel menempati urutan pertama, kedua Provinsi Gorontalo, ketiga NTT, keempat Sulut, kelima Sulbar, keenam Sulteng, dan urutan yang ketujuh adalah Sultra.

Setiap Provinsi berbeda dalam mengembangkan sektor pembangunan

Pariwisata dan budaya. Misalkan Provinsi NTT menempati ranking pertama untuk sektor tersebut. Kedua Sulsel, ketiga Sulut, keempat Sulteng, dan Provinsi Sultra keenam.

Sektor pembangunan yang kesembilan diprioritaskan oleh setiap Provinsi adalah sektor ketertiban dan ketentraman. Provinsi yang memprioritaskan sektor ini adalah NTT berada di urutan pertama, kedua Sulsel, ketiga Sultra, keempat Sulut, kelima Sulteng, dan yang keenam Sulbar, serta ketujuh adalah Gorontalo.

Secara keseluruhan dengan memperhatikan alokasi fungsional budgetingnya menunjukkan bahwa besaran anggaran masing-masing daerah berdasarkan skala prioritas. Diperhatikan dari keberadaan ranking alokasi anggarannya Provinsi Sulsel berada posisi ranking satu dan dua. Provinsi Sulteng rankingnya berada pada tataran 3, 4, 5, dan 6. Provinsi Sulut berada pada ranking 3, 4, dan 5. Lain halnya Provinsi Sultra memiliki ranking 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sulbar rankingnya berkisar pada 5, 6, dan 7. Provinsi Gorontalo ranking 2, 6, dan 7. Sedang provinsi NTT memiliki ranking 1,2, 3, 5, dan 6.

1.2. Analisis Menurut Alokasi Pengeluaran APBD 2011

Berdasarkan alokasi APBD 2010 menurut pengeluaran ada 8 jenis yaitu belanja pegawai (BP), belanja hibah (BH), belanja bagi hasil (BBH), belanja bantuan keuangan (BBK), belanja bantuan sosial (BBS), belanja tak terduga (BTT), belanja barang dan jasa (BBJ), dan belanja modal (BM).

Khusus untuk jenis pengeluaran belanja pegawai (BP), Provinsi Sulawesi Tengah proporsinya sebesar 34%, Sulawesi Utara mencapai 36%, Sulawesi Selatan 27%, Sulawesi Tenggara 36%, Sulawesi Barat 25%, Gorontalo 34%, dan Nusa Tenggara Timur 38%. Pengeluaran untuk barang dan jasa (BBJ) Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan sebesar 28% sedang belanja modal (BM) mencapai 22%. Sulawesi Utara sebesar BBJ sebesar 21% dan BM sebesar 19%. Sulawesi Selatan BBJ mencapai 19% dan BM sebesar 9%. Demikian pula dengan Sulawesi Tenggara BBJ sebesar 19% dan BM-nya mencapai 32%. Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan BBJ sebesar 33% dan BM sebesar 32%. Gorontalo untuk alokasi BBJ sebesar 27% dan BM-nya 20%. Sedangkan provinsi Nusa Tenggara Timur alokasi belanja barang dan jasa sebesar 24% dan belanja modal mencapai 17%.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa proporsi alokasi belanja pegawai untuk 7 Provinsi berkisar antara 25-38%. Belanja yang disediakan oleh masing-masing daerah baik di Nusa Tenggara Timur dan Provinsi yang ada di regional Sulawesi dipergunakan untuk membiayai aparatur. Belanja hibah kurang dari 1%; belanja bagi hasil antara 0,0-23%; belanja bantuan keuangan juga antara 0,0-17%; belanja bantuan sosial antara 0,0-0,1%; dan yang berikut belanja tidak terduga kurang 1%. Berdasarkan proporsi alokasi belanja yang ada, masing-masing daerah perlu meningkatkan belanja modal untuk pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar Putong. 2009. Economics Pengantar Mikro dan Makro. Penerbit: Mitra Wacana Media.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen DalamNegeri 2010.

APBD daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah menggunakan data APBD 2011.

Lampiran – 1 Alokasi APBD 2010 Menurut Jenis Pengeluaran dan Proporsi

DAERAH	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Tidak Terduga	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
Prop. Sulawesi Tengah	1,074,099	364,237	-	-	20,426	93,327	51,254	8,000	5,000	299,078	232,776
Prop. Sulawesi Utara	1,076,555	388,928	-	-	63,500	132,000	4,000	45,000	7,500	228,172	207,455
Prop. Sulawesi Selatan	2,406,327	640,885	400	-	70,000	554,000	408,000	27,032	15,000	466,569	224,441
Prop. Sulawesi Tenggara	1,297,758	461,406	-	-	3,822	60,080	205,000	1,388	2,500	244,930	318,633
Prop. Sulawesi Barat	562,792	142,406	-	700	6,930	35,000	-	12,803	2,000	183,987	178,966
Prop. Gorontalo	492,667	168,089	-	5,300	8,500	38,500	30,566	3,000	2,500	135,262	100,950
Prop. Nusa Tenggara Timur	1,084,552	409,643	-	-	5,655	69,421	47,282	44,667	10,000	311,196	186,688

Proporsi Alokasi APBD 2010 menurut Fungsi

Prop. Sulawesi Barat	1	0.495	0.051	0.069	0.132	0.209	0.019	0.011	0	0.013
Prop. Gorontalo	1	0.505	0.004	0.046	0.187	0.194	0.025	0.021	0.006	0.012
Prop. Sulawesi Tenggara	1	0.438	0.102	0.073	0.122	0.228	0.012	0.003	0.011	0.011
Prop. Sulawesi Selatan	1	0.629	0.038	0.082	0.106	0.104	0.012	0.012	0.009	0.007
Prop. Sulawesi Utara	1	0.500	0.074	0.058	0.132	0.185	0.016	0.007	0.016	0.011
Prop. Sulawesi Tengah	1	0.434	0.077	0.103	0.123	0.217	0.016	0.004	0.016	0.009
Prop. Nusa Tenggara Timur	1	0.424	0.008	0.122	0.181	0.179	0.028	0.008	0.020	0.029

Alokasi APBD 2010 menurut Fungsi Berdasarkan Rangkings

Prop. Sulawesi Barat	6	6	5	6	7	6	7	5	7	6
Prop. Gorontalo	7	7	7	7	6	7	6	2	6	7
Prop. Sulawesi Tenggara	2	2	1	4	3	1	5	7	5	3
Prop. Sulawesi Selatan	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2
Prop. Sulawesi Utara	4	3	4	5	4	4	3	4	3	4
Prop. Sulawesi Tengah	5	4	3	3	5	3	4	6	4	5
Prop. Nusa Tenggara Timur	3	5	6	2	2	5	1	3	1	1